

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Bisnis Indonesia

Wilayah Berita : Kabupaten Semarang

Halaman 4

BPK Diminta Audit Pembangunan RSUD

UNGERAN - DPRD Kabupaten Semarang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit hasil pekerjaan pembangunan RSUD Ungaran tahap I yang menelan dana Rp 44,4 miliar sebelum proyek tahap II yang dianggarkan Rp 55 miliar di APBD Kabupaten Semarang 2018 dilelang. Karena setelah dicek oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang hasil pekerjaan konstruksi struktur bangunan 7 lantai tersebut dinilai jelek.

Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto mengatakan, pihaknya akan melayangkan surat ke BPK untuk melakukan audit hasil pekerjaan pembangunan RSUD Ungaran tahap I yang baru selesai Desember 2017. Audit BPK itu dilakukan sebelum proyek tahap II dilelang dan dilaksanakan tahun 2018.

"Kita akan minta BPK mengaudit hasil pekerjaan tahap I, karena setelah dicek oleh teman-teman Banggar DPRD ternyata banyak cor beton tidak

lurus, masih bolong-bolong, ada retak, dan ada adendum dua kali untuk membangun talud yang menurut kami tidak penting.

Kami DPRD mengawal pembangunan RSUD Ungaran dari mulai pengadaan tanah sampai anggarannya, kalau ternyata jadinya seperti itu kita sangat kecewa," tandas Krebo, panggilan akrab Bambang Kusriyanto Minggu (14/1).

Menurut Krebo, perlunya audit BPK itu karena pembangunan tahap II nanti belum

tentu dikerjakan oleh kontraktor tahap I karena Banggar DPRD meminta agar pelaksana proyek tahap I, yakni PT DMI di-blacklist mengingat kualitas pekerjaannya jelek. Sehingga dari hasil audit BPK akan diketahui apakah harus diperbaiki, dikurangi biayanya atau ada temuan lainnya. "Yang penting audit BPK melihat bangunan seperti itu bagaimana? Secara administratif saya kira benar semua, ada adendum dua kali dan ada spek (spesifikasi) tetapi ketika menjadi bangunan hasilnya kok seperti itu," tukasnya.

Ia membeberkan, dalam proyek RSUD Ungaran tahap I ternyata ada anggaran untuk konsultan pengawas (manajemen konstruksi) sebesar Rp 800 juta dan Rp 150 juta untuk konsultan perencana yang bersumber dari RSUD Ungaran sendiri diluar anggaran fisik. Adanya anggaran itu tidak disampaikan dalam rapat Banggar tetapi baru disampaikan ketika pengecekan di lapangan. "Kalau manajemen kons-



Bambang Kusriyanto.

Foto : Budhi

truksi dibayar Rp 800 juta kenapa tidak mengingatkan kontraktor ketika kualitas pekerjaannya jelek. Harusnya ditegur dulu, tidak justru kesannya membela kontraktor saat rapat banggar," tegas Krebo yang juga Ketua Banggar DPRD.

Krebo mengungkapkan, semangat membangun RSUD Ungaran sudah diusulkan tahun 2011 tetapi pembelian tanah di belakang RSUD Ungaran selalu gagal. Tapi pembelian lahan tersebut bisa te-

realisasi tahun 2015.

"Teman-teman DPRD terutama Banggar DPRD mengusulkan agar dibangun rumah sakit 7 lantai untuk menambah tempat tidur kelas III, sehingga Detail Engineering Design (DED) dibuat tahun 2016. Sesuai DED dibutuhkan anggaran Rp 100 miliar yang disepakati dibiayai APBD Kabupaten Semarang tanpa bantuan provinsi maupun pusat, karena semangat kita untuk kepentingan masyarakat tidak mampu," bebarnya.

■ Kecewa

Kata Krebo, keseriusan DPRD dibuktikan dengan mencairkan dana melalui saving anggaran sehingga tahun 2017 dialokasikan Rp 50,5 miliar untuk pembangunan tahap I. Sebelum proyek dilelang, 2 Februari 2017 Banggar DPRD memanggil pengguna anggaran, PPKom, ULP sampai tim teknis didapat penjelasan bahwa anggaran itu untuk membangun struktur bangunan 7 lantai termasuk dindingnya.

"Proses lelangnya kita sangat kecewa karena BUMN bisa kalah dengan PT DMI, sehingga kita curiga karena DMI pernah kasus di Kabupaten Semarang saat membangun lapangan pacuan kuda di Tegalwaton Tenganan. Mereka bertahan bahwa DMI sudah ganti, tapi orang yang namanya Ma-tono tidak disebut di DMI sehingga teman-teman DPRD ber-prasangka hanya pinjam benderanya," katanya.

Setelah dilelang, ujar Krebo, 6 Juni 2017 banggar memanggil lagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan RSUD Ungaran, mulai pengguna anggaran, PPKom, konsultan pengawas dan konsultan perencanaan.

"Kita minta dilaksanakan serius karena dana APBD itu dari masyarakat, tapi ternyata hasilnya seperti itu. Kita mengimbau kepada semua pemangku kepentingan mbok ya dalam membangun itu memprioritaskan mutunya," pungkasnya.

rbd/SR